**FOSTERING HARMONY DURING THE ERA OF RACIAL CONFLICT IN THE 1980S: SOCIAL DYNAMICS BETWEEN JAVANESE DOMESTIC WORKERS AND CHINESE-INDONESIAN HOUSEHOLDS IN SEMARANG**

**Harmoni Di Tengah Konflik Rasial 1980: Interaksi Sosial Pembantu Rumah Tangga Jawa Dengan Keluarga Tionghoa Di Semarang**

**Yassinka Amara Maulinda1a(\*) Bambang Rakhmanto2b**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang

[*yassinkaam20@students.unnes.ac.id*](mailto:yassinkaam20@students.unnes.ac.id)

[*bambang.rakhmanto@gmail.com*](mailto:bambang.rakhmanto@gmail.com)

(\*) Corresponding Author

[yassinkaam20@students.unnes.ac.id](mailto:yassinkaam20@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Yassinka Amara Maulinda. (2025). Harmoni Di Tengah Konflik Rasial 1980: Interaksi Sosial Pembantu Rumah Tangga Jawa Dengan Keluarga Tionghoa Di Semarang. doi**:** [**10.36526/js.v3i2.**](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.695)**5536**

|  |  |
| --- | --- |
| Received : 14-06-2025  Revised : 30-06-2025  **Accepted: 11-07-2025**  **Keywords:**  Maid,  Conflict,  Chinese,  Semarang | **Abstract** |
| This study explores how Javanese domestic workers interact with Chinese-Indonesian employers in Semarang after 1980, amid ongoing social tensions and ethnic differences in Indonesia. Using a qualitative approach and case study method, data were collected through interviews, observations, and document analysis from several Chinese-Indonesian households employing Javanese domestic workers. The findings reveal that, despite the presence of inequality in the employment relationship, daily interactions often reflect forms of social harmony. This harmony emerges through mutual understanding, cultural tolerance, and various negotiation strategies employed by both parties. Harmony, in this context, does not imply the absence of conflict but rather the ability to manage differences in order to maintain a stable working relationship. This research offers new insights into the intersection of ethnic and class relations in everyday life and contributes to a deeper understanding of interethnic relations and social dynamics in Indonesia. |

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keberagaman budaya, suku, dan etnis selaras dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang memiliki makna “Berbeda-Beda Tetapi Tetap Satu”. Keberagaman Indonesia sendiri mulanya terbentuk karena adanya bangsa asing yang pernah datang ke Indonesia untuk sekedar singgah atau menetap, contohnya seperti Cina, Eropa, Arab, dan India. Dari situlah berbagai suku serta budaya yang beragam hadir (Wales, R., 2022). Diantara para imigran yang pernah datang ke Indonesia, masyarakat Tionghoa lah yang paling banyak dan juga menetap di Indonesia.

Keberagaman bukanlah sebuah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Umumnya, masyarakat Indonesia membaginya kedalam dua kategori yaitu etnis pribumi dan etnis pendatang. Etnis Tionghoa termasuk dalam kategori pendatang dan bisa dikatakan sebagai kelompok minoritas ditengah masyarakat Indonesia (Suparlan, P., 2003). Keanekaragaman budaya dalam kehidupan juga terlihat pada Kota Semarang, Jawa Tengah. Semarang sebagai kota yang pluralis, dikatakan seperti itu karena Semarang sendiri dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang suku dan budaya (Setiawan, S. W., & Sibarani, R., 2020). Keberagaman masyarakat di kota-kota besar seperti Semarang juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam struktur pekerjaan rumah tangga yang melibatkan berbagai latar belakang etnis, seperti halnya profesi pembantu.

Konflik rasial 1980 atau konflik anti-Tionghoa yang terjadi di Semarang merupakan bagian dari konflik yang awal mulanya terjadi di Kota Solo. Awal mula terjadinya konflik ini sebenarnya dipicu oleh kejadian kecil di mana terjadi perdebatan antara seorang pelajar Jawa dengan pemuda Tionghoa (Wigarani, L., Bain, B., & Witasari, N., 2019). Meski dipicu oleh sebab yang bisa dikatakan sepele namun kejadian ini menjadi konflik yang cukup besar dan memicu kemarahan massa karena adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu. Ketegangan ini akhirnya menjadi konflik yang besar yang mana melibatkan massa dalam jumlah besar dan terjadi secara masif pada beberapa kota yang dampaknya menyebar di Jawa Tengah yang salah satunya Semarang.

Sejarah biasanya hanya mencatat ataupun mengisahkan tentang tokoh-tokoh besar dan orang-orang yang memiliki kuasa akan suatu peristiwa (Kurniawan et al., 2019). Namun dalam tulisan kali ini, penulis ingin menyajikan sebuah narasi yang menceritakan tentang kehidupan orang-orang kecil. Sebagian dari kita mungkin berpikir mengapa kehidupan seputar pembantu rumah tangga harus dikaji? Sikap pengabaian semacam itu dapat membawa dampak bagi historiografi Indonesia yang mana historiografi Indonesia hanya didominasi oleh tema orang orang besar dan berkuasa sehingga tema sejarah mengenai orang kecil lambat laun akan menghilang. Tokoh orang kecil yang akan menjadi kajian utama pada penelitian kali ini adalah ‘Pembantu Rumah Tangga’.

Sejak ratusan tahun lalu, saat Indonesia masih berada di bawah pemerintahan bangsa asing, rakyat Indonesia selalu menjadi pekerja ataupun bawahan (Nuryadi, N., 2017). Dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar yang juga memiliki peran besar serta popularitas, jumlah rakyat yang tergolong menengah ke bawah dan bisa dikatakan memiliki peran kecil atau bahkan tidak berperan dalam keberlangsungan sejarah yang selama ini tercatat jauh lebih banyak. Gagasan mengenai kelompok masyarakat kecil semacam ini juga dikemukakan oleh Gayatri Chakravorty Spivak seorang perempuan India yang berprofesi sebagai profesor di Universitas Pittsburgh (Wijanarko, A. F., Murtiningsih, S., 2024).

Spivak menjadi tokoh yang menggagas mengenai keberlangsungan hidup dari kaum subaltern. Kaum subaltern sendiri juga kita kenal dengan orang orang kecil seperti buruh, petani, dan kelompok lainnya yang tidak memiliki kekuasaan. Kaum subaltern sendiri memiliki makna yang sama dengan kaum marginal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri pemaknaan kaum marginal berarti masyarakat yang terpinggirkan yang diserap dari Bahasa Inggris yaitu “Marginal” yang memiliki arti efek yang kecil. Kelompok masyarakat yang dimaksud dalam pemaknaan kaum subaltern dan marjinal pun sama yaitu orang orang dengan latar belakang yang tidak memiliki pengaruh yang besar bagi sebuah peradaban.

Pembantu Rumah Tangga (PRT) sering kali dikaitkan dengan kemiskinan dan tingkat Pendidikan yang rendah. Angka pengangguran yang tinggi di Indonesia serta kurangnya lapangan pekerjaan menjadikan seseorang mengambil pilihan sebagai pembantu rumah tangga yang dinilai sebagai solusi yang cepat dan tepat. Meskipun terkadang pekerjaan sebagai pembantu dianggap remeh namun para pembantu rumah tangga memberikan banyak sumbangsih serta mempermudah kehidupan orang-orang yang sibuk di luar rumah, mereka membutuhkan pembantu sebagai orang yang membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah.

Perjalanan sejarah Indonesia banyak sekali mencatat pihak pihak asing yang turut ambil peran didalamnya. Bangsa asing yang pernah singgah diantaranya Belanda, Jepang, orang-orang Timur Tengah, Portugis, Inggris, Tionghoa, dan lainnya (Harkanitiningsih N, 2014) Bangsa asing yang pernah singgah tersebut tidak selalu bermaksud menjajah tetapi ada tujuan lain mereka datang ke Indonesia seperti contohnya berdagang, karena dahulu Indonesia memiliki pelabuhan yang mumpuni serta pada masa kerajaan pun Indonesia pernah menjadi pusat perdagangan. Selain berdagang, ada pula yang memang menetap dan membangun peradaban hingga saat ini yaitu etnis Tionghoa. Peran Tionghoa dalam sejarah Indonesia bisa dikatakan cukup besar. Salah satu contoh dimana etnis Tionghoa memiliki peran penting adalah pada saat peristiwa pemindahan Keraton di Surakarta (Rustopo, 2013). Selain memiliki peran yang cukup besar di Indonesia sampai saat ini pun mereka masih bertahan di Indonesia dan mampu mendirikan sebuah peradaban di tiap daerah di Indonesia.

Pecinan adalah sebuah istilah yang sering orang Indonesia gunakan untuk menyebutkan pemukiman yang didiami oleh mayoritas etnis Tionghoa. Beragam sekali budaya yang lahir dari peranakan Tionghoa, budaya tersebut berakulturasi dengan budaya Indonesia dan berkembang di Nusantara serta berproses sedemikian rupa hingga melahirkan simbiosis mutualisme (Al Qurtuby & Kholiludin, 2021). Sebesar apapun peran masyarakat etnis Tionghoa, mereka juga membutuhkan orang-orang dibelakangnya dalam menunjang kegiatan mereka sehari-hari. Pembantu rumah tangga dalam keluarga Tionghoa mungkin di mata masyarakat luas memiliki peran yang cenderung kecil dalam catatan sejarah, namun mereka juga memiliki catatan perjalanan yang menarik untuk diketahui masyarakat luas terkhusus masyarakat Indonesia.

Penelitian kali ini berlatar tempat di Semarang karena Semarang sendiri dahulu menjadi salah satu tempat dengan pelabuhan dan perdagangan yang maju, Semarang tumbuh menjadi kota pelabuhan di mana bukan hanya pedagang antar pulau dan daerah, tetapi juga berlaku bagi bangsa asing (Supriyadi, B., 2008). Salah satu cara masuk orang-orang Tionghoa adalah melalui perdagangan. Selain dilatarbelakangi karena Semarang merupakan kota besar, pengambilan Semarang dalam lingkup penelitian karena Semarang cenderung damai dan bisa dikatakan tidak ada konflik besar dengan etnis Tionghoa seperti yang terjadi di Surakarta maupun Jakarta.

Beberapa hal yang akan dikaji dalam penelitian ini seputar kehidupan pembantu rumah tangga selama bekerja pada keluarga Tionghoa, perubahan gaya hidup yang mereka bawa pada lingkungannya setelah lama beradaptasi dengan budaya Tionghoa, relasi antara pekerja dengan majikannya, serta peristiwa apa saja yang pernah terjadi selama mereka dipekerjakan dalam keluarga Tionghoa. Selain itu, hal yang akan juga dikaji pada penelitian kali ini adalah peran perempuan dari golongan marginal yang seharusnya memiliki kontribusi besar pada pencatatan sejarah atau Historiografi dan membantah anggapan bahwa historiografi hanya mencatat perjalanan sejarah orang- orang besar saja.

**METODE**

Dalam proses penelitian mengenai interaksi antara pembantu rumah tangga (PRT) Jawa dengan Majikan Tionghoa 1980, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Wasino dan Endah Sri Hertatik (2018) penelitian sejarah adalah proses penelitian yang memiliki ciri khas yang membedakannya dari penelitian lain dalam bidang sosial-humaniora. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, yaitu peristiwa sosial yang sudah terjadi di masa lalu. Biasanya, peristiwa ini memiliki jarak waktu yang cukup jauh dari kehidupan peneliti, kecuali dalam sejarah kontemporer, di mana kejadian yang diteliti masih cukup dekat dengan zaman peneliti. Oleh karena itu, penelitian sejarah membutuhkan cara khusus dalam mengumpulkan, memeriksa, dan memahami sumber-sumber sejarah agar bisa menggambarkan kejadian di masa lalu dengan benar dan objektif. Sedangkan menurut Garraghan (1957) Metode penelitian sejarah merupakan Suatu kumpulan prinsip dan aturan yang disusun secara sistematis untuk membantu dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilai atau memeriksa sumber tersebut secara kritis, serta menyajikan hasil akhir yang telah dianalisis, biasanya dalam bentuk tulisan.

Penelitian sejarah berperan penting untuk membantu kita memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu yang memungkinkan untuk kita mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi di masa lalu, bagaimana peristiwa tersebut berkembang, serta dampaknya bagi masyarakat yang kemudian dapat memberikan wawasan untuk masa yang akan datang. Metode penelitian sejarah dengan menggunakan sumber primer tertulis adalah cara mengumpulkan dan menganalisis informasi langsung dari sumber pertama yang berbentuk tulisan. Sumber primer ini memberikan gambaran langsung tentang suatu peristiwa karena dibuat pada waktu yang sama dengan kejadian tersebut.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan empat tahap utama: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama adalah heuristik, yakni pengumpulan sumber primer seperti wawancara dengan pembantu rumah tangga (PRT) Jawa dan keluarga Tionghoa di Semarang. Sumber sekunder seperti buku, koran sezaman, serta artikel juga digunakan untuk memperkuat konteks. Selanjutnya, dilakukan kritik sumber untuk menilai keaslian (kritik eksternal) dan kredibilitas isi (kritik internal) dari data yang diperoleh. Setelah itu, tahap interpretasi dilakukan untuk memahami dinamika interaksi sosial, kekuasaan, dan harmoni yang terjalin antara kedua kelompok. Terakhir, hasil penelitian disusun dalam bentuk historiografi sebagai narasi sejarah yang menggambarkan relasi sosial yang tumbuh di tengah latar belakang konflik etnis pasca-1980.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**HARMONI KOTA SEMARANG DI TENGAH KONFLIK 1980 YANG MEREBAK**

Konflik rasial 1980 atau konflik anti-Tionghoa merupakan bagian dari konflik yang awal mulanya terjadi di Kota Solo. Awal mula terjadinya konflik ini sebenarnya dipicu oleh kejadian kecil di mana terjadi perdebatan antara seorang pelajar Jawa dengan pemuda Tionghoa. Meski dipicu oleh sebab yang bisa dikatakan sepele namun kejadian ini menjadi konflik yang cukup besar dan memicu kemarahan massa karena adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu. Ketegangan ini akhirnya menjadi konflik yang besar yang mana melibatkan massa dalam jumlah besar dan terjadi secara masif pada beberapa kota di Jawa Tengah yang salah satunya Semarang (*Walikota Solo: Pelajar Agar Tetap Tenang Tak Terpancing Emosi dan Hasutan,*1980: Suara Merdeka*)*.

Konflik yang terjadi di Surakarta mulai pecah pada tanggal 22 November 1980. Sejumlah pelajar dan kelompok yang tidak dikenal mulai anarkis dan melakukan perusakan pada properti milik warga yang diketahui keturunan Tionghoa. Untuk beberapa saat, suasana kota sedikit kacau sehingga pemerintah memberlakukan jam malam untuk sementara. Masyarakat keturunan Tionghoa memiliki ketakutan tersendiri untuk keluar rumah yang diakibatkan dari konflik rasial ini (Wigarani, L., Bain, B., & Witasari, N., 2019).

Kerusuhan yang terjadi memiliki berbagai penyebab, dengan faktor ekonomi menjadi salah satu yang paling menonjol. Warga Tionghoa dikenal sukses dalam bidang perdagangan, yang menimbulkan kecemburuan sosial pada beberapa masyarakat Jawa. Selain itu, faktor sosial dan politik pun turut memperburuk situasi (Rahman, N. E., 2013). Sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa bukanlah hal baru; sejak masa kolonial, mereka sering menjadi sasaran diskriminasi. Keberhasilan mereka dalam ekonomi sering dianggap sebagai ancaman bagi kelompok mayoritas, selain karena faktor ekonomi faktor sosial dan politik juga menjadi salah satu alasan timbulnya diskriminasi terhadap minoritas. Penggunaan istilah minoritas yang kerap terdengar di Indonesia sering kali digunakan sebagai segregasi sosial dalam konteks yang negatif (Burhani, A. N., 2021)

Konflik rasial yang terjadi di Kota Solo adalah konflik yang mulanya timbul karena alasan yang bisa dikatakan sepele karena konflik ini mulanya hanya sebatas konflik pribadi. Tapi, konflik antar individu ini dapat menyebabkan kerusuhan yang besar dan menjadi konflik yang serius (Putra, Atmaja, Sodiq, 2017). Meskipun konflik rasial di Kota Solo dampaknya hingga ke sekitarnya seperti Boyolali, Ambarawa, Semarang, serta kota lain di sekitarnya. Namun, berbanding terbalik dengan yang terjadi di Semarang, di mana tidak ada kerusuhan besar yang terjadi seperti di kota tetangga yaitu Solo. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Johanes selaku masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di Semarang, beliau mengatakan bahwa tidak pernah ada kerusuhan yang terjadi di Semarang. Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Untung dan Bapak Andri yang juga sebagai masyarakat keturunan Tionghoa, beliau mengatakan hal yang sama bahwa tidak pernah terjadi kerusuhan di Semarang, bahkan di tahun 1998 di mana terjadi konflik yang cukup besar di Solo dan cukup sensitif bagi beberapa pihak salah satunya masyarakat Tionghoa, Semarang tidak sekalipun ada konflik semacam itu, masyarakat hidup damai dan saling menghargai.

Mengenai hidup berdampingan, pada tahun 1980, Gubernur Jateng Haji Soepardjo menghimbau kepada masyarakat keturunan Tionghoa agar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan hidup damai berdampingan. Himbauan tersebut dilaksanakan dalam sebuah acara pertemuan yang digelar di Balai kota Semarang dan dihadiri oleh beberapa tokoh penting (Gubernur Jateng Soepardjo: Masyarakat Tionghoa harus sesuaikan lingkungan, 1980: Suara Merdeka). Hal tersebut, merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Semarang pada saat itu untuk menghilangkan perbedaan, agar semua terlihat sama rata sebagai masyarakat Indonesia tanpa ada kata minoritas dan mayoritas.

Secara keseluruhan, kerusuhan anti-Tionghoa atau konflik rasial yang terjadi, menunjukkan betapa rentannya posisi etnis minoritas di tengah ketidakstabilan sosial dan politik. Meskipun mereka tidak memiliki pengaruh besar dalam politik, dominasi mereka di sektor ekonomi membuat kelompok Tionghoa sering menjadi sasaran kemarahan massa. Kebijakan asimilasi yang diterapkan pada masa Orde Baru seharusnya menjadi solusi, namun belum mampu menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya, sehingga kerusuhan terus terjadi. Peristiwa ini menjadi pengingat penting akan perlunya penguatan toleransi, perlindungan hukum yang adil, serta pendekatan kebijakan yang lebih bijak terhadap keberagaman etnis di Indonesia.

**Interaksi yang Terbangun Antara Pembantu Rumah Tangga dengan Majikannya**

Struktur masyarakat Semarang mencerminkan keberagaman etnis dan budaya, termasuk etnis Jawa, Tionghoa, Arab, dan pribumi lainnya. Semarang sebagai kota pelabuhan memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan, sehingga terbentuklah masyarakat urban dengan stratifikasi sosial yang kompleks (Lombard, 1996). Komunitas Tionghoa sering kali menempati lapisan masyarakat kelas menengah dan atas terutama di sektor ekonomi. Sebagaimana penelitian Wasito (2021) menyebutkan bahwa etnis Tionghoa sering kali diposisikan sebagai kelompok yang berada di lapisan paling atas dalam stratifikasi sosial-ekonomi masyarakat. Pemahaman ini tidak sepenuhnya mencerminkan realitas, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk dari mitos politik yang dikembangkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Makna etnis Tionghoa sebagai "makhluk ekonomi" muncul sebagai bagian dari proses eksklusif yang dilakukan oleh negara, terutama pada masa Orde Baru (Jati, 2021). Namun di sisi lain masyarakat pribumi lebih banyak bekerja sebagai petani, buruh, atau pegawai pemerintah. Kawasan Pecinan di Semarang menjadi simbol integrasi etnis Tionghoa dalam dinamika kota dengan aktivitas perdagangan dan budaya yang kental.

Kebijakan tersebut berupaya mengarahkan etnis Tionghoa ke dalam sektor ekonomi tertentu, sambil membatasi mereka dari partisipasi politik dan bidang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kendali terhadap komunitas Tionghoa sekaligus menjaga dominasi kelompok mayoritas dalam aspek-aspek kehidupan lainnya. Konstruksi ini tidak hanya memengaruhi persepsi terhadap etnis Tionghoa, tetapi juga memperkuat *stereotip* bahwa mereka semata-mata fokus pada aktivitas ekonomi, sementara kontribusi mereka dalam bidang sosial dan budaya sering kali diabaikan.

Presiden Soekarno sendiri dalam pidato pembukaan Baperki tanggal 13 Maret 1963 menyatakan: *“*Sebetulnya di Indonesia kita mengenal minoritas... di Indonesia kita hanya mengenal suku-suku. Saja tidak akan berkata suku itu adalah minoritas... Suku Dajak adalah minoritas, Suku Irian Barat adalah Minoritas... Suku Tionghoa adalah minoritas, tidak! Tidak ada minoritas, hanja ada suku-suku sebab manakala ada minoritas, ada majoritas. Dan biasanya kalau ada majoritas, dia lantas *expliotation de la minorite par la majorite.”* (Suryadi, A., 2023). Pada pidatonya tersebut Presiden Soekarno ingin menekankan bahwa tidak ada istilah minoritas dan mayoritas, perbedaan yang terletak antar individu adalah suku.

Dapat dikatakan bahwa keluarga Tionghoa di Semarang memiliki pengaruh dalam perekonomian lokal, terutama di sektor perdagangan, distribusi barang, dan jasa (Suryadinata, 2002). Mereka dikenal sebagai pedagang ulung yang mendominasi aktivitas ekonomi di kota tersebut. Banyak di antara mereka yang mengelola usaha grosir, toko kelontong, dan industri pengolahan makanan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat tetapi juga meningkatkan dinamika ekonomi regional. Etos kerja yang tinggi, pengelolaan keuangan yang cermat, dan kemampuan membangun jaringan bisnis yang kuat menjadi ciri khas komunitas ini.

Sebagaimana penelitian fitri (2015) yang menjelaskan bahwa di Pasar Gang Baru Semarang menunjukkan bahwa etnis Tionghoa memiliki etos kerja yang tinggi dan budaya kerja yang khas, yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan kota Semarang.

Sebagai bagian dari keluarga yang umumnya sibuk dengan aktivitas bisnis, rumah tangga Tionghoa sering kali mempekerjakan pembantu rumah tangga (PRT) untuk membantu pekerjaan domestik, seperti memasak, membersihkan rumah, dan menjaga anak. Kehadiran PRT menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran kehidupan sehari-hari keluarga Tionghoa. Jumlah PRT dalam satu keluarga biasanya bergantung pada tingkat ekonomi dan ukuran keluarga.

Adanya pekerjaan ini memungkinkan PRT ini untuk menjalin relasi dengan majikannya. Relasi dapat diartikan sebagai hubungan yang terbentuk antara dua pihak atau lebih dalam konteks sosial dan ekonomi yang biasanya memiliki tujuan tertentu (Fathy, 2019). Dalam hal ini, relasi yang terbangun antara pembantu rumah tangga dengan majikannya merupakan hasil dari interaksi dalam konteks pekerjaan yang melibatkan peran, kewajiban, hak, serta norma-norma sosial yang berlaku.

Interaksi dalam dunia kerja ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status sosial, kebudayaan, nilai-nilai tradisional, dan struktur kekuasaan dalam keluarga atau masyarakat. Dalam banyak keluarga Tionghoa yang masih memegang nilai-nilai tradisional, relasi antara pembantu rumah tangga dan majikan umumnya bersifat terstruktur dan jelas. Pembantu rumah tangga dipercaya untuk menjalankan berbagai tugas penting dalam rumah tangga, seperti merawat rumah, memasak, dan menjaga anak. Hubungan ini didasari oleh pembagian peran yang tegas, di mana majikan memberikan arahan demi kelancaran pekerjaan sehari-hari. Meskipun tanggung jawabnya besar, peran pembantu rumah tangga sangat dihargai karena turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan keluarga yang tertata dan harmonis.

Di sisi lain, beberapa keluarga Tionghoa mungkin memiliki pendekatan yang lebih paternalistik dalam relasi dengan pembantu rumah tangga mereka. Dalam kasus ini, meskipun pembantu rumah tangga tetap menjalankan pekerjaan domestik, mereka diperlakukan hampir seperti anggota keluarga. Dalam hubungan ini, majikan lebih memperhatikan kesejahteraan fisik dan emosional pembantu rumah tangga, memberikan mereka fasilitas tempat tinggal, makanan, dan kadang-kadang akses ke pendidikan atau pelatihan keterampilan. Pembantu rumah tangga dalam hubungan paternalistik sering merasa lebih dihargai dan diperlakukan dengan lebih manusiawi.

Interaksi antara suku Jawa dan etnis Tionghoa di Semarang tetap terjaga dengan baik meskipun terjadi kerusuhan rasial pada tahun 1980. Hal ini tidak terlepas dari hubungan sosial dan budaya yang sudah lama terjalin di antara keduanya. Sejak dahulu, Semarang dikenal sebagai kota yang multikultural, di mana warga dari berbagai latar belakang hidup berdampingan. Suku Jawa dan Tionghoa sering berinteraksi dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi seperti perdagangan dan pekerjaan, maupun dalam kehidupan sosial di lingkungan tempat tinggal. Kebersamaan ini menumbuhkan rasa saling mengenal dan saling menghormati.

Selain itu, sikap saling menghargai budaya masing-masing turut memperkuat hubungan antara kedua kelompok ini. Walaupun ada segelintir pandangan negatif, secara umum mereka tetap menjaga harmoni dalam pergaulan. Hubungan mereka juga semakin kuat karena adanya kebutuhan sosial dan ekonomi yang saling menguntungkan. Banyak warga Tionghoa dan Jawa yang saling bergantung satu sama lain dalam usaha atau jasa, sehingga tercipta rasa saling membutuhkan yang mempererat interaksi.

Tak hanya itu, organisasi sosial dan keagamaan juga memainkan peran penting dalam membina hubungan yang baik. Melalui kegiatan bersama dan dialog antar komunitas, mereka menciptakan ruang untuk saling memahami dan menyelesaikan perbedaan dengan damai. Dengan adanya fondasi hubungan yang kuat dan rasa saling percaya ini, konflik yang terjadi tidak serta-merta memutuskan hubungan baik di antara mereka. Sebaliknya, nilai-nilai kebersamaan yang sudah dibangun sejak lama menjadi penopang utama bagi keharmonisan masyarakat Semarang, khususnya antara suku Jawa dan etnis Tionghoa.

**Keseharian Pembantu Rumah Tangga dalam Keluarga Tionghoa Selama Mereka Menjalani Profesi**

Keseharian pembantu rumah tangga dalam keluarga Tionghoa mencerminkan perpaduan antara rutinitas yang terstruktur dengan tuntutan emosional yang kompleks. Pekerjaan mereka mencakup berbagai tugas domestik, seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, merawat anak-anak, dan terkadang merawat orang tua yang lanjut usia. Pembantu rumah tangga, terutama yang tinggal bersama majikan (*live-in*), memulai hari mereka sejak pagi hari, bahkan sebelum keluarga bangun. Tugas pertama biasanya adalah menyiapkan sarapan untuk keluarga, dilanjutkan dengan membersihkan rumah, mencuci piring, dan mempersiapkan makanan untuk makan siang atau malam. Selain pekerjaan rumah tangga yang rutin, pembantu juga sering diminta untuk menjalankan tugas tambahan, seperti mengantarkan anak-anak ke sekolah atau menemani anggota keluarga yang lebih tua ke dokter. Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga sering kali melibatkan waktu yang panjang, serta keterlibatan dalam banyak aspek kehidupan keluarga majikan.

Norma-norma tradisional dalam keluarga Tionghoa turut memengaruhi keseharian pembantu rumah tangga. Banyak keluarga yang menjalankan kehidupan yang disiplin dan teratur, dan ini tercermin dalam cara mereka mengatur pekerjaan pembantu rumah tangga. Pembantu yang tinggal di rumah biasanya memiliki ruang pribadi yang terbatas dan waktu istirahat yang minim. Mereka bekerja sepanjang hari dengan waktu luang yang sangat terbatas, hanya bisa beristirahat ketika majikan selesai dengan aktivitas mereka. Meskipun demikian, beberapa keluarga Tionghoa menunjukkan perhatian lebih terhadap kesejahteraan pembantu rumah tangga dengan memberikan waktu libur dan perlakuan yang lebih manusiawi, seperti memberikan jatah cuti atau memberi mereka kesempatan untuk menjalani kehidupan pribadi di luar pekerjaan (Onghokham & JJ, 2005). Dalam beberapa kasus, pembantu bahkan diberi akses untuk mengikuti kegiatan sosial atau acara keluarga.

Namun, meskipun ada hubungan yang cukup dekat antara pembantu dan keluarga majikan, posisi sosial pembantu rumah tangga tetap berada di bawah anggota keluarga inti. Mereka sering kali diperlakukan dengan cara yang mencerminkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat Tionghoa, yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat. Pembantu rumah tangga, meskipun sering diundang untuk merayakan hari besar atau mengikuti acara sosial keluarga, tetap tidak memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan keluarga. Oleh karena itu, meskipun ada hubungan emosional yang terjalin, batasan sosial tetap jelas dan sulit untuk dilampaui.

Di sisi lain, kehidupan pribadi pembantu rumah tangga sering kali terabaikan. Mereka biasanya menghabiskan waktu luang mereka hanya untuk beristirahat, dan jarang memiliki kesempatan untuk kembali ke keluarga mereka yang tinggal jauh di kampung halaman (Soekiman et al., 2011). Terbatasnya waktu luang ini membuat banyak pembantu rumah tangga merasa terisolasi, terutama jika mereka bekerja jauh dari tempat asal mereka. Meskipun demikian, dalam banyak kasus, pembantu rumah tangga yang telah lama bekerja dengan keluarga Tionghoa mengembangkan ikatan emosional yang cukup kuat dengan anggota keluarga. Mereka sering menjadi saksi dari banyak peristiwa penting dalam kehidupan keluarga, seperti kelahiran anak-anak, pernikahan, atau bahkan kematian anggota keluarga. Dengan demikian, meskipun status mereka sebagai pekerja tetap ada, hubungan personal yang terjalin bisa menjadi aspek yang cukup penting dalam kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari pembantu rumah tangga dalam keluarga Tionghoa adalah campuran antara rutinitas yang ketat, kerja keras, dan relasi sosial yang kompleks. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran rumah tangga, namun sering kali terjebak dalam struktur sosial yang memisahkan mereka dari anggota keluarga lainnya. Di satu sisi, pembantu rumah tangga merupakan bagian integral dari kehidupan keluarga, tetapi di sisi lain, mereka juga harus menghadapi keterbatasan dan pembatasan yang datang dengan posisi mereka sebagai pekerja yang berada di bawah struktur hierarki sosial keluarga.

Pembantu dan pekerja rumah tangga lain sejatinya memiliki makna yang berbeda secara harfiah meskipun orang-orang sering kali menganggap penyebutan tersebut merujuk pada satu makna yang sama. Pembantu serta pekerja rumah tangga lain memang saling melakukan pekerjaan rumah seperti mengurus pekerjaan rumah, membersihkan rumah maupun merawat anak (Hidayati, 2015). Pembantu rumah tangga merujuk pada penjelasan mengenai sebuah bidang profesi yang terbatas dalam rumah tangga dan bersifat rutin seperti membersihkan, merapikan, membereskan, dan berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya. Sedangkan penggunaan kata pekerja rumah tangga merujuk pada pemaknaan bidang pekerjaan yang berbagai jenis berkaitan dengan kerumahtanggaan seperti mengasuh anak, merawat lansia, mengurus tanaman, dan lain sebagainya serta diperlukan keterampilan khusus. Sebenarnya, penyebutan mengenai kepanjangan dari PRT antara Pembantu atau Pekerja juga masih diperdebatkan oleh banyak orang. Beberapa orang berpendapat bahwa sah saja menggunakan kata atau panggilan pembantu terhadap orang yang bekerja membantu urusan rumah tangga namun sebagian orang juga menilai bahwa penyebutan kata pembantu kurang pas serta berkonotasi negatif.

Profesi pembantu rumah tangga (PRT) yang awalnya dikenal dengan istilah "babu" memiliki sejarah panjang dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan keluarga Tionghoa. Istilah "babu" pada masa itu tidak hanya merujuk pada pekerjaan sebagai pembantu tetapi juga mencerminkan status sosial yang rendah dengan peran yang cenderung diabaikan dan dianggap sebagai pekerjaan yang tidak terhormat. Dalam konteks keluarga Tionghoa di Semarang, profesi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga mereka pada paruh pertama abad ke-20 hingga 1960-an.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "babu" diartikan sebagai perempuan pembantu rumah tangga, sementara "jongos" merujuk pada laki-laki pembantu rumah tangga (Nurlitasari & Ikaningtyas, 2022). Istilah-istilah ini mengandung konotasi yang merendahkan dan diskriminatif, mencerminkan hierarki sosial yang timpang pada masa itu. Selain itu, kedua istilah ini sarat dengan konotasi hierarkis yang menempatkan pekerja domestik di posisi subordinat, mencerminkan sistem feodal dan struktur kolonial yang mengakar pada saat itu. Seiring berkembangnya zaman penggunaan istilah semacam itu perlahan dihapus dan diubah menjadi pembantu rumah tangga (PRT) yang konteksnya terdengar lebih positif.

Pada masa ini, pekerja rumah tangga sering kali merupakan perempuan yang berasal dari kalangan miskin atau kelompok etnis tertentu, seperti orang Jawa yang bekerja dalam keluarga Tionghoa sebagai bentuk penyediaan jasa rumah tangga. Dalam banyak kasus, mereka berasal dari keluarga kurang mampu yang terpaksa mengandalkan pekerjaan sebagai babu untuk bertahan hidup. Seperti yang dikemukakan oleh Rokhmansyah (2016) profesi ini lebih dianggap sebagai pekerjaan yang tidak memiliki prestise tinggi dan sering kali dihubungkan dengan stereotip negatif dalam masyarakat Indonesia. Pekerjaan ini lebih banyak dijalani oleh perempuan yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan atau peluang pekerjaan yang lebih baik.

Penelitian Pino dan Triwihana (2023) menyebutkan bahwa keluarga Tionghoa di Semarang yang sebagian besar terlibat dalam sektor perdagangan dan bisnis, tentunya mereka membutuhkan jasa pembantu rumah tangga untuk membantu pekerjaan rumah sehari-hari. Pekerja rumah tangga ini dipekerjakan untuk tugas-tugas seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan merawat anak-anak atau orang tua yang sakit. Para pekerja ini sering kali tinggal bersama keluarga majikan mereka, menempati ruang yang terpisah atau kamar yang tidak mencerminkan status sosial tinggi.

Sebagian besar pembantu rumah tangga pada waktu itu adalah perempuan dari kalangan keluarga kurang mampu, bahkan ada yang berasal dari daerah luar Semarang yang datang dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui pekerjaan di rumah tangga.

Pada banyak keluarga, pembantu rumah tangga tetap berada dalam posisi yang sangat subordinat, tanpa adanya perubahan yang signifikan dalam hal kesejahteraan dan status sosial mereka. Meskipun begitu, beberapa keluarga yang lebih memperhatikan kesejahteraan pembantu rumah tangga memberikan upah dalam bentuk uang dan menyediakan fasilitas yang lebih baik, seperti kamar tidur yang layak dan waktu istirahat yang cukup. Meski demikian, pengakuan terhadap profesi ini masih sangat terbatas pada saat itu, dan sebagian besar pembantu rumah tangga harus menerima kenyataan bekerja dalam kondisi yang penuh ketidakpastian dan ketidakadilan.

Dari wawancara dengan beberapa pembantu rumah tangga yang telah bekerja dalam keluarga Tionghoa pada dekade 1970-an hingga 1990-an, mayoritas dari mereka menceritakan bahwa sistem pembayaran upah pada masa itu sangat bergantung pada hubungan kekeluargaan dan kepercayaan antara pembantu dan majikan. Banyak yang mengaku menerima kompensasi berupa tempat tinggal dan makanan, dengan sedikit uang saku yang kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.

Salah satu responden bernama Ibu Suyani, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dalam keluarga Tionghoa pada tahun 1980-an, mengungkapkan: *"Saya tinggal bersama keluarga majikan dan makan bersama mereka. Uang yang saya terima bisa dikatakan cukup, tapi sebagai tolak ukur mungkin gaji yang saya terima saat itu dikatakan kecil dibanding dengan kerja formal. Tapi saya tidak bisa menuntut lebih, karena mereka sudah memberi saya tempat tinggal dan makanan."*

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pembantu rumah tangga, faktor-faktor yang memengaruhi sistem upah antara lain adalah ukuran keluarga, status sosial ekonomi keluarga, serta hubungan pribadi antara pembantu dan majikan. Keluarga Tionghoa yang memiliki usaha atau bisnis besar biasanya memberikan gaji yang lebih tinggi dan fasilitas yang lebih baik, sementara keluarga yang lebih kecil atau kelas menengah mungkin lebih membatasi jumlah uang yang diberikan, walaupun tetap memberikan tempat tinggal dan makanan.

**PENUTUP**

Hubungan antara pembantu rumah tangga Jawa dan keluarga Tionghoa di Semarang mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, di mana ketimpangan kelas, relasi etnis, dan sejarah konflik saling memengaruhi. Meskipun terdapat harmoni dalam interaksi sehari-hari, ketidaksetaraan dalam sistem kerja dan ketegangan historis menunjukkan bahwa relasi ini tidak sepenuhnya bebas dari persoalan struktural. Peristiwa kerusuhan anti-Tionghoa tahun 1980 menjadi pengingat bahwa prasangka dan kecemburuan sosial dapat berkembang menjadi konflik terbuka apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang adil dan pendekatan yang inklusif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama untuk membangun relasi antar kelompok yang lebih setara, berkeadilan, serta menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al Qurtuby, S., & Kholiludin, T. (2021). *Tionghoa dan Budaya Nusantara*. Semarang: Elsa Press.

Amalia, F. (2015). Etos budaya kerja pedagang etnis Tionghoa di Pasar Semawis Semarang. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 4(1).

Burhani, A. N. (2021). *Dilema minoritas di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fathy, R. (2019). Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17.

Hafidz, M., & Andriasari, D. (2022). Kajian terhadap kasus penyiksaan ART sebagai bentuk kekerasan domestik baru di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 57–62.

Harkantiningsih, N. (2014). Pengaruh kolonial di Nusantara. *KALPATARU, Majalah Arkeologi*, 23(1), 1–80.

Hidayati, N. (2015). Beban ganda perempuan bekerja (antara domestik dan publik). *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(2).

Jati, W. R. (2021). Relasi antar umat mayoritas dan minoritas: Studi masyarakat Tionghoa di Surabaya. *Harmoni*, 20(2), 276–292.

Kurniawan, G. F., Warto, W., & Sutimin, L. A. (2019). Dominasi orang-orang besar dalam sejarah Indonesia: Kritik politik historiografi dan politik ingatan. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(1), 36–52.

Lombard, D. (1996). *Nusa Jawa: Warisan kerajaan-kerajaan konsentris* (Vol. 3). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nurlitasari, F. P., & Ikaningtyas, D. A. A. (2022). Rijsttafel di Jawa masa kolonial Belanda (1900–1942). *Kronik: Journal of History Education and Historiography*, 6(2).

Nuryadi, N. (2017). Gambaran imperialisasi dan kolonialisasi di Pulau Jawa abad ke-19 dalam travel writing: *A Visit to Java* karya William Basil Worsfold. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2), 93–103.

Onghokham, R., & JJ, R. (2005). *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Komunitas Bambu.

Pino, & Triwahana. (2023). Akulturasi kebudayaan dan peran perekonomian etnis Tionghoa di Kota Semarang 1950–1960. *Karmawibangga: Historical Studies Journal*, 5(2), 18–40.

Putra, Atmaja, Sodiq. 2017. Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa dengan Pribumi Jawa di Surakarta Tahun 1972-1998. *Journal of Indonesian History.*

Rahman, N. E. (2013). Konflik dan Kecemburuan Sosial Antara Etnis Tionghoa dan Masyarakat Pandhalungan di Daerah Besuki-Situbondo. *Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia*, 173-183.

Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.

Rustopo, R. (2013). Kontribusi orang-orang Tionghoa di Surakarta dalam kebudayaan Jawa 1895–1998. *Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, 8(2).

Setiawan, S. W., & Sibarani, R. (2020). Budaya Srawung sebagai potret toleransi beragama dan bersuku untuk meredam konflik di Kota Semarang. *Anthropos*, 6(2), 194–204.

Soekiman, D., Bambu, K., & Sunjayadi, A. (2011). *Kebudayaan Indis; Dari zaman Kompeni sampai Revolusi*.

Suara Merdeka. (1980). Gubernur Jateng Soepardjo: Masyarakat Tionghoa harus sesuaikan lingkungan. Desember. hlm. 2.

Suara Merdeka. (1980). *Walikota Solo: Pelajar agar tetap tenang tak terpancing emosi dan hasutan.* November. hlm. 8.

Suparlan, P. (2003). Kesukubangsaan dan posisi orang Cina dalam masyarakat majemuk Indonesia. *Antropologi Indonesia* (71).

Supriyadi, B. (2008). Kajian waterfront di Semarang. *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman*, 7(1), 50–58.

Suryadi, A. (2023). *BAPERKI jalan terjal integrasi Tionghoa di Indonesia.* Klaten: Penerbit Lakeisha.

Suryadinata, L. (2002). *Negara dan etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia.

Wales, R. (2022). Pendidikan Multikultural di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, *1*(01).

Wawancara: Bapak Andri pada hari Kamis, 01-05-2025, pukul 10.15 WIB.

Wawancara: Bapak Johanes pada hari Selasa, 15-10-2024, pukul 13.44 WIB.

Wawancara: Bapak Untung pada hari Jumat, 14-03-2025, pukul 19.30 WIB.

Wawancara: Ibu Suyani pada hari Sabtu, 10-08-2024, pukul 19.00 WIB.

Wigarani, L., Bain, B., & Witasari, N. (2019). Kerusuhan anti Tionghoa di Semarang tahun 1980. *Journal of Indonesian History*, 8(2), 113–120.